

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo

a. Visi dan Misi BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo

Visi berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas

Tenaga Kerja Kota Probolinggo yakni: “TERWUJUDNYA LEMBAGA PELATIHAN YANG MENCIPTAKAN TENAGA KERJA PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN BERBASIS KOMPETENSI”.

Misi Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bagi tenaga kerja dan masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan mampu menyediakan Tenaga Kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.
- 3) Mampu mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dan efisien.
- 4) Memberikan pelayanan informasi Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan (Kios 3 in 1).

Menyangkut arti dan makna dari penjabaran misi tersebut diatas adalah :

- 1) Dengan ketrampilan yang dimiliki agar menjadi modal tenaga kerja dan masyarakat dapat bersaing untuk memasuki pasar kerja dalam dan luar negeri maupun berwirausaha mandiri.
- 2) Agar pencari kerja, penganggur dan masyarakat mempunyai minat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas ketrampilannya.
- 3) Dengan sumber daya pelatihan yang ada dapat digunakan seefisien mungkin untuk kemajuan, kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan (Kios 3 in 1).

b. Ruang Lingkup Tugas Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Probolinggo

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian pertama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja / Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun rumusan kebijaksanaan teknis dibidang pelatihan dan usaha penyediaan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan, pengetahuan dan sikap mental dibidang usaha kecil, menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Balai Latihan Kerja.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenis ketrampilan.
- 3) Pelaksanaan uji ketrampilan , kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
- 4) Penghimpunan data dan informasi tentang penyelenggaraan Balai Latihan Kerja.

- 5) Pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja.
- 6) Pelaksanaan tata usaha dan pelaporan ,monitoring dan evaluasi.
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja / Loka Latihan Kerja dibantu oleh 1 (satu) orang Ka Subagian Tata Usaha yaitu melakukan tugas-tugas administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, tata laksana dan perlengkapan.

c. Jenis-Jenis Pelayanan Balai Latihan Kerja (BLH) Kota Probolinggo

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksan Teknis Dinas Balai Latihan Kerja/Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah pelayanan berupa penyelenggaraan berbagai macam jenis pelatihan ketrampilan bagi para pencari kerja, penganggur dan masyarakat di lingkungan Kota Probolinggo yang terdiri dari:

- 1) Pelatihan Berbasis Kompetensi
- 2) Pelatihan Berbasis Masyarakat
- 3) Pelatihan Keliling/ MTU.

B. Penyajian Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Keterampilan Menjahit dan Pembuatan Kue

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau pikiran. Dalam implementasi, komunikasi menjadi hal yang penting, karena komunikasi menjadi salah satu cara agar tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan yang ada dapat tersampaikan kepada kelompok sasaran. Sehingga, dengan adanya komunikasi ini, diharapkan tidak ada penyimpangan yang terjadi pada proses implementasi.

Komunikasi yang terjalin dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ini terjadi antara BLK Kota Probolinggo dengan Kelurahan, dimana BLK Kota Probolinggo menginformasikan kepada Kelurahan terkait adanya pelatihan keterampilan kepada warga difabel. Komunikasi juga dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Probolinggo yang mana sebagai Dinas yang telah membiayai pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan menjahit dan pembuatan kue yang diselenggarakan di BLK Kota Probolinggo. Sedangkan dalam komunikasi selama pelatihan berlangsung, komunikasi berjalan cukup baik, kecuali bagi penyandang disabilitas seperti tunarungu yang mengalami kesulitan. Namun, sebagai solusinya BLK Kota Probolinggo telah menyediakan seseorang yang dapat melakukan bahasa isyarat untuk membantu proses penyampaian komunikasi dalam kegiatan keterampilan tersebut bagi penyandang disabilitas tunarungu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku Kepala BLK Kota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“saya beserta pegawai yang lain melakukan komunikasi dengan menginformasikan kepada kelurahan-kelurahan terkait dengan pemberdayaan kepada disabilitas ini. Beberapa tahun lalu, pelatihan diadakan di kelurahan Jati, karena pesertanya memang warga disabilitas di kelurahan Jati. Tapi kemudian, kami pindahkan kesini, di BLK. Kalau komunikasi selama pelatihan ya cukup baik. Sulitnya itu komunikasi dengan peserta tunarungu. Karena disabilitas yang dapat mengikuti pelatihan adalah disabilitas dengan kekurangan fisik dan selain tunanetra. Karena tunanetra langsung kami kirim ke Bali apabila ingin mengikuti pelatihan.” (Wawancara penulis dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku Kepala BLK Kota Probolinggo, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Dengan pertanyaan yang sama, Ibu Endah Dwi Kumalasari, S. STP., M.M selaku Lurah Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, mengatakan bahwa:

“komunikasi Saya dengan Kepala BLK sangat baik, karena dulunya pelatihan dilakukan di kelurahan Jati. Karena memang ini langkah awal dalam pemberdayaan disabilitas. Ya kami harus berkomunikasi dengan baik demi kelancaran kebijakan yang telah dibuat.” (Wawancara penulis dengan Ibu Endah Dwi Kumalasari, S. STP., M.M selaku Lurah Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo)

Hal senada juga disampaikan oleh ketua peserta penyandang disabilitas, Bapak Ashani, mengatakan bahwa:

“komunikasi yang terjalin selama pelatihan sudah cukup baik. Dan penyampaian ilmu dalam keterampilan juga mudah saya pahami. Bagi teman saya yang tunarungu ternyata para pelatih BLK juga bisa menggunakan bahasa isyarat untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan oleh pelatih keterampilan.” (Wawancara penulis dengan Bapak Ashani selaku ketua kelompok penyandang disabilitas, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB)

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik dan diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Dalam hal, ini sumber daya dapat terwujud sebagai sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial.

Sumber daya dalam hal ini merupakan pelaksana yaitu dari BLK Kota Probolinggo, yang mana sebagai instansi yang menyelenggarakan pelatihan telah memiliki sumber daya manusia dengan keterampilan sesuai dengan bidangnya, yang siap untuk memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Sedangkan untuk sumber daya finansial adalah dari Dinas Sosial Kota Probolinggo yang merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Sehingga, kedua instansi ini bekerja sama dalam mengadakan pelatihan bagi penyandang disabilitas di Kota Probolinggo.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku kepala BLK Kota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang ada di BLK. Dalam hal ini kami sudah menyiapkan sumber daya manusia yang berkompetensi, serta memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat bagus. Dan kami juga telah menempatkan sumber daya tersebut sesuai dengan bidang yang telah dia tekuni.” (Wawancara penulis dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku Kepala BLK

Kota Probolinggo, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Nasser Aunurrofiq selaku salah satu pelatih menjahit di BLK Kota Probolinggo, mengatakan bahwa:

“Sumber daya dalam pemberdayaan disabilitas ini ya seluruh staf yang ada di BLK Kota Probolinggo. Terkait dengan manusianya, pelatih keterampilan yang ada di BLK Kota Probolinggo memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya, yang siap untuk memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Terkait sumber dana, dana untuk pemberdayaan ini telah didanai oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo.” (Wawancara penulis dengan Bapak Nasser Aunurrofiq selaku salah satu pelatih menjahit di BLK Kota Probolinggo, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Hal senada juga disampaikan oleh, Ibu Fidunyah Hasanah selaku salah satu penyandang disabilitas, mengatakan bahwa:

“selama saya melakukan pelatihan, saya menilai bahwa sumber daya di BLK sangat baik. Saya dengan peserta yang lain benar-benar dilatih oleh orang yang ahli dengan bidangnya. Penyampaiannya mudah, nyaman, dan juga sangat menyenangkan.” (Wawancara penulis dengan Ibu Fidunyah Hasanah selaku salah satu penyandang disabilitas, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB)

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap atau watak dari pelaksana implementasi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, juga menjadi sebuah hal penting. Karena ini juga berpengaruh seberapa jauh suatu implementasi kebijakan berhasil dilaksanakan. Sikap ini dapat berupa komitmen tinggi, kejujuran, ketelitian, demokratis, dan lain sebagainya. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Dalam hal ini, sikap yang dimiliki oleh pelaksana pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu BLK Kota Probolinggo adalah sikap yang sabar, komitmen tinggi, serta tanggung jawab. Sikap ini sangat diperlukan dimiliki oleh setiap pelatih keterampilan khususnya bagi penyandang disabilitas, karena disanalah kinerja dan tujuan pelatihan harus tercapai dalam membantu agar mereka dapat belajar untuk mencukupi kehidupan mereka sendiri serta memberikan dorongan bahwa mereka masih dapat melakukan sesuatu dengan keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu, para pelatih juga diharapkan untuk tidak mudah putus asa dalam melatih mereka, mengingat keterbatasan yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku kepala BLK Kota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“terkait sikap yang ini, saya selaku kepala BLK Kota Probolinggo mawas diri bahwa dalam hal ini sedang melatih orang yang istimewa, sehingga saya juga telah menyampaikan kepada pada karyawan bahwa kita harus memiliki sikap sabar, komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Ini demi tujuan dari pemberdayaan bagi disabilitas ini.” (Wawancara penulis dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku Kepala BLK Kota Probolinggo, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Nasser Aunurrofiq selaku salah satu pelatih menjahit di BLK Kota Probolinggo, mengatakan bahwa:

“mengenai sikap ya tetap harus biasa saja menurut saya. Dalam artian ya mengerti bahwa mereka berbeda dengan yang lain karena keterbatasan yang mereka miliki, tetap biasa maksudnya

adalah tidak terlalu menunjukkan juga agar mereka tidak minder. Kecuali memang yang perlu perlakuan khusus. Jadi sikap ini menurut saya ya sabar dan juga tidak mudah putus asa.” (Wawancara penulis dengan Bapak Nasser Aunurrofiq selaku salah satu pelatih menjahit di BLK Kota Probolinggo, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Hal senada juga disampaikan oleh, Ibu Iftitah Maqiah salah satu penyandang disabilitas, mengatakan bahwa:

“saya secara pribadi senang dengan adanya pelatihan ini. Karena saya bisa belajar sesuatu dan membuktikan bahwa saya juga bisa sama dengan yang lain. Selama pelatihan yang saya ikuti, sikap dari para pelatih itu sangat baik dan juga sabar. Ya terkadang marah tapi sambil melucu, jadi saya dan peserta yang lain tidak terbawa suasana. Toh kami juga paham bahwa mereka tidak mungkin benar-benar marah dengan kami.” (Wawancara penulis dengan Ibu Iftitah Maqiah, salah satu penyandang disabilitas, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB)

d. Struktur Birokrasi

Selain ketiga variabel yang telah disebutkan diatas, struktur birokrasi juga sama pengaruhnya dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting, karena posisi diri setiap aparatur akuntabel, efisien, efektif, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi suatu hal yang dapat berpengaruh pada meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Struktur birokrasi dalam hal ini sangatlah penting. Hal ini berguna agar terdapat kejelasan dalam pengimplementasian kebijakan terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, struktur birokrasi tersebut telah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dimana BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo memberikan informasi terkait

pelatihan bagi penyandang disabilitas kepada setiap kelurahan di Kota Probolinggo. Dan BLK Kota Probolinggo juga berkaitan dengan Dinas Sosial Kota Probolinggo terkait dengan sumber dana finansial dalam pelaksanaan pelatihan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku kepala BLK Kota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“dalam hal ini, ini kan sangat penting. Jadi saya dan para pegawai BLK yang membidangi melakukan sesuai dengan struktur yang ada. Kami yang menyelenggarakan, dengan biaya dari Dinas Sosial. Dan disinipun, saya sendiri selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai, lakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan sampai melakukan hal yang melenceng, kecuali memang telah diperintah dengan atasan” (Wawancara penulis dengan Bapak. Wahono Arifin, S.H., M.M selaku Kepala BLK Kota Probolinggo, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Nasser Aunurrofiq selaku salah satu pelatih menjahit di BLK Kota Probolinggo, mengatakan bahwa:

“Saya dan pelatih yang lain sudah melakukan sesuai dengan yang telah diamanatkan. Sesuai dengan perintah, juga mematuhi birokrasi yang ada. Namun terkait pelatihan ya itu sudah menjadi wewenang kami. Tapi setiap kegiatan kan pasti ada aturannya, ya kami jalankan sesuai dengan struktur birokrasi yang sudah ada di BLK ini.” (Wawancara penulis dengan Bapak Nasser Aunurrofiq selaku salah satu pelatih menjahit di BLK Kota Probolinggo, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Hal senada juga disampaikan oleh, Ibu Endah Dwi Kumalasari, S.STP., M.M selaku Lurah Jati Kecamatan Mayangan Kota probolinggo, mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini, saya disini selaku kepanjangan tangan dari BLK ini, ya menjalankan setiap apa yang memang menjadi tugas saya.

Setiap informasi yang masuk ke kelurahan, seperti pelatihan pemberdayaan bagi disabilitas ini, kami disini ya menginformasikan kepada warga kami. Karena jika dari atas struktur birokrasi sudah baik, sampai dibawah juga harus baik. Ini kan juga demi kelancaran dan keberhasilan kebijakan yang sudah dibuat, agar terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.” (Wawancara penulis dengan Ibu Endah Dwi Kumalasari, S.STP., M.M selaku Lurah Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB)

2. Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Keterampilan Menjahit dan Pembuatan Kue

Melalui pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BLK (Badan Latihan Kerja) Kota Probolinggo, yang juga telah bekerjasama dengan Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk mengikutsertakan warga penyandang disabilitas mengikuti pelatihan keterampilan menjahit dan pembuatan kue. Maka, dari pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan ini ternyata memiliki semangat yang lebih besar. Sehingga hasil dari semangat mereka tersebut memotivasi mereka untuk terus belajar dan belajar. Dari pelatihan keterampilan ini, hasil yang didapat dari penyandang disabilitas memang jauh berbeda dengan peserta pelatihan yang lain. Namun dengan semangat tadi telah menghasilkan karya yang tidak jauh berbeda. Malah dari pelatihan inilah kemudian beberapa penyandang disabilitas berusaha untuk membuka peluang usaha untuk mencukupi kehidupan mereka dan sebagai bentuk dari kemandirian mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku kepala BLK Kota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“dari pemberdayaan yang telah dilakukan, saya melihat semangat kelompok disabilitas itu lebih besar dibanding dengan kelompok biasa. Dengan adanya kesempatan ini, mereka tidak menyalahkannya, sehingga mereka terus berusaha untuk belajar dan terus belajar.” (Wawancara penulis dengan Bapak Wahono Arifin, S.H., M.M selaku Kepala BLK Kota Probolinggo, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Nasser Aunurrofiq selaku salah satu pelatih menjahit di BLK Kota Probolinggo, mengatakan bahwa:

“hasil memang berbeda jika dibanding dengan yang lain. Namun, beberapa juga bisa menghasilkan karya yang tidak jauh berbeda dengan yang lain. Ini dikarenakan semangat mereka yang tinggi dan dengan adanya pelatihan ini memotivasi mereka untuk dapat berusaha mandiri.” (Wawancara penulis dengan Bapak Nasser Aunurrofiq selaku salah satu pelatih menjahit di BLK Kota Probolinggo, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor BLK Kota Probolinggo)

Hal senada juga disampaikan oleh, Bapak Ashani selaku ketua kelompok penyandang disabilitas, mengatakan bahwa:

“tentang hasil ya saya menyadari bahwa saya dan peserta yang lain tidak bisa menghasilkan yang sempurna. Tapi dengan diadakannya pelatihan bagi orang seperti kami ini sudah sangat membantu kami untuk dapat mandiri dan menghidupi kehidupan kami. Beberapa dari kami malah berencana untuk bekerjasama dalam membuka usaha. Jadi dengan adanya pelatihan keterampilan ini, kami bisa membuka wawasan dan peluang untuk dapat semakin mandiri dan tidak lagi dipandang sebelah mata.” (Wawancara penulis dengan Bapak Ashani selaku ketua kelompok penyandang disabilitas, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 10.45 WIB)

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas melalui Menjahit dan Pembuatan Kue

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan berdasarkan Teori George C. Edwards III, maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi. Menurut Edwards, Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Subarsono, 2011).

Komunikasi dalam hal mengimplementasikan kebijakan yang ada yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas, maka komunikasi yang terjalin antara BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo selalu menginformasikan kepada Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terkait dengan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Komunikasi dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kepada penyandang disabilitas terjalin cukup baik. Namun, BLK Kota Probolinggo telah menyediakan mediator bagi disabilitas tunarungu. Sedangkan bagi tunanetra, BLK Kota Probolinggo mengirim langsung disabilitas yang bersangkutan ke Bali. Pemberdayaan yang seringkali ikut dalam pelatihan keterampilan di BLK Kota Probolinggo ini adalah penyandang disabilitas dengan cacat fisik.

Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan komunikasi yang terjalin dalam pengimplementasian kebijakan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ini sudah terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari komunikasi dengan Kelurahan yang terus terjalin dengan baik serta komunikasi yang juga dilakukan selama proses pelatihan. Meskipun terdapat kendala seperti disabilitas tunarungu, BLK Kota Probolinggo ternyata tetap mampu untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat atau menggunakan media lain. Dengan komunikasi yang telah diupayakan dengan sebaik mungkin oleh BLK Kota Probolinggo, diharapkan dapat membuat kebijakan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terus dilaksanakan seterusnya guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

b. Sumber Daya

Dengan variabel komunikasi yang sangat berpengaruh pada sebuah implementasi kebijakan, maka tentu memerlukan sumber daya yang dapat digunakan sebagai komunikator atau pemberi komunikasi dan juga sumber daya lain yang menunjang terlaksananya kebijakan. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya juga menjadi hal yang penting. Seperti halnya yang disampaikan oleh Edwards, bahwa sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya financial (Subarsono, 2011).

Mengingat yang dikatakan oleh Edwards, bahwa sumber daya menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, maka

sumber daya yang ada di BLK Kota Probolinggo haruslah sumber daya yang memiliki kualitas. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka sumber daya pada BLK Kota Probolinggo dapat dipastikan memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat baik serta mereka juga memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan dengan ditunjang oleh sumber daya finansial dari Dinas Sosial Kota Probolinggo, selaku instansi yang juga terkait dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Probolinggo.

Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya pada BLK (Badai Latihan Kerja) Kota Probolinggo dikatakan sudah sangat baik dengan kualitas dan kuantitas, serta keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan ketersediaan sumber daya yang sangat baik ini, tentu pengimplementasian pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dapat terlaksana dengan baik. Ditambah lagi dengan sumber daya finansial yang telah diberikan oleh Dinas Sosial yang merupakan sebagai instansi yang juga termasuk dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Dengan unsur sumber daya yang sangat baik serta ketersediaan sumber daya finansial yang jelas, maka pelaksanaan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh BLK Kota Probolinggo diharapkan terus dilaksanakan dan dapat membantu pencapaian tujuan dari pemberdayaan penyandang disabilitas tersebut.

c. Disposisi

Selain kedua variabel diatas, terdapat variabel disposisi yang juga berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis (Subarsono, 2011). Dalam hal disposisi ini, BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo terutama pelatih keterampilan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas telah mawas diri bahwa mereka harus dapat membantu dan menyampaikan keahlian mereka kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan tertentu. Sehingga, dalam hal sikap ini, para pelatih keterampilan menjahit dan pembuatan kue di BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo telah memiliki sikap sabar dan telaten, tidak mudah putus asa, komitmen, serta tanggung jawab yang tinggi.

Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh khususnya para pelatih keterampilan di BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo telah ditunjukkan dengan sangat baik. Disposisi atau sikap sabar dan telaten ini memang seharusnya dimiliki oleh pelatih keterampilan menjahit dan pembuatan kue, demikian juga untuk tidak mudah putus asa. Hal ini sepantasnya dimiliki karena mengingat bahwa yang mereka beri pelatihan merupakan masyarakat yang memiliki keterbatasan. Sehingga, dengan keterampilan yang para pelatih miliki, menjadi sebuah keharusan bahwa mereka harus berkomitmen dan bertanggung jawab atas apa yang telah ditugaskan serta bagaimana mereka membantu para penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan mampu mencukupi kehidupan mereka sendiri.

d. Struktur Birokrasi

Selain ketiga variabel diatas, maka kejelasan pada struktur birokrasi juga menjadi hal yang sangat diperlukan dalam upaya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Karena dengan struktur birokrasi yang baik dan bagus, maka sebuah kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran (Subarsono, 2011).

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ini melibatkan beberapa instansi yang merupakan memang tanggung jawab instansi tersebut dalam pengimplementasian pemberdayaan penyandang disabilitas ini. Secara jelas, Dinas Sosial Kota Probolinggo yang merupakan instansi yang membiayai pelatihan keterampilan. Sedangkan BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo sebagai instansi yang menyelenggarakan implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan menjahit serta pembuatan kue. Dalam BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo sendiri, struktur birokrasinya juga sudah jelas serta tugas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dalam hal ini, BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo telah memiliki sumber daya manusia yang sudah ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Serta para pelatih keterampilan juga merupakan orang yang ahli dalam bidangnya.

Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan terkait pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan menjahit dan pembuatan kue, telah sesuai dengan struktur birokrasi yang baik dan jelas. Hal ini jelas terlihat dari alur bagaimana implementasian kebijakan ini dijalankan. Dengan dana yang didapat dari Dinas Sosial Kota Probolinggo, BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo kemudian mengumumkan kepada setiap kelurahan bahwa ada pelatihan kepada penyandang disabilitas. Maka, dengan struktur birokrasi yang baik dan jelas tersebut, implementasi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Diharapkan dengan pelaksanaan implementasi yang baik ini, pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dapat terus dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Menjahit dan Pembuatan Kue

Dalam setiap implementasi kebijakan yang telah dilakukan, maka terdapat hasil atau *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan yang dilakukan. Hasil ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan kebijakan yang telah dirumuskan sejak awal. Hasil pelaksanaan dalam implementasi kebijakan terkait pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo melalui pelatihan keterampilan menjahit dan pembuatan kue menghasilkan *output* yang diharapkan.

Dalam pelatihan ini, para penyandang disabilitas yang ikut ternyata memiliki semangat yang lebih besar dari peserta selain disabilitas. Sehingga, dari semangat mereka tersebut telah memotivasi mereka untuk terus belajar dan belajar. Dengan antusiasme dari peserta penyandang disabilitas ini, maka menyebabkan para pelatih keterampilan juga bersemangat untuk menularkan ilmu yang telah mereka miliki.

Output yang dihasilkan dari pelatihan keterampilan ini, memang memiliki hasil jauh berbeda dengan peserta pelatihan yang lain. Namun dengan semangat tadi telah menghasilkan karya yang tidak jauh berbeda serta menjadikan karya tersebut lebih bermakna bagi mereka. Dengan kemampuan yang ternyata mereka miliki, mereka juga menyadari bahwa kekurangan fisik yang mereka miliki tidaklah menjadi sebuah penghalang yang besar, apabila mereka mau untuk belajar dan terus berusaha. Malah dari pelatihan inilah kemudian beberapa penyandang disabilitas berusaha untuk membuka peluang usaha untuk mencukupi kehidupan mereka dan sebagai bentuk dari kemandirian mereka.

Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Ini terlihat dari hasil keterampilan yang ternyata cukup bagus bagi mereka penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, ternyata mereka masih bisa berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu, apabila ada pendampingan yang dapat

membantu dan mengarahkan mereka. Terbukti bahwa mereka juga memiliki semangat yang tinggi, sehingga para pelatih juga sangat termotivasi untuk menularkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki kepada mereka. Dari pelatihan keterampilan menjahit dan pembuatan kue ini juga terdapat beberapa penyandang disabilitas yang akhirnya menekuni apa yang mereka dapat dari pelatihan. Dengan hal ini, maka pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Probolinggo telah membuat mereka dapat hidup mandiri serta dapat berusaha untuk mencukupi kehidupan mereka sendiri.